

## **Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutuk? Sebuah Pertimbangan Kritis-Stratejik**

**Oleh Dr. der Phil. Reza A.A Wattimena**

*Dr. der Phil. Reza Alexander Antonius Wattimena. Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijakan Timor. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Pernah mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Presiden, Universitas Multimedia Nusantara dan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Beberapa karyanya: **Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018), Memahami Ilmu Hubungan Internasional Kontemporer (2019), Protopia Philosophia (2019)** dan berbagai karya lainnya di surat kabar, website, jurnal ilmiah maupun buku.*

### **Abstrak**

Tulisan ini merupakan analisis terhadap kaitan antara keberadaan sumber daya alam, konflik dan perdamaian. Di satu sisi, sumber daya alam adalah berkah alam untuk manusia, supaya ia bisa mempertahankan keberadaannya, dan mengembangkan kebudayaannya. Sumber daya alam yang diolah dengan baik bisa membantu terciptanya kemakmuran dan perdamaian yang lestari di suatu masyarakat. Di sisi lain, terutama sejak akhir abad 20, sumber daya alam justru menjadi sumber konflik bersenjata yang melahirkan korban jiwa maupun harta benda yang besar di berbagai belahan dunia. Beberapa unsur yang memicu konflik, sekaligus mendorong perdamaian, terkait dengan sumber daya alam yang ada, akan dibahas di dalam tulisan ini. Tulisan ini mengacu pada penelitian yang dibuat oleh Michael Beevers, sekaligus penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis.

**Kata-kata Kunci: Sumber Daya Alam, Kutukan Sumber Daya Alam, Keamanan Lingkungan, Konflik, Perdamaian**

### **Abstract**

This article analyzes the connection between the abundant existence of natural resources, conflict and peace. On the one hand, natural resources can be seen as blessing for human, so they can thrive and prosper. With fair and effective management, natural resources can provide prosperity and sustainable peace for society. On the other hand, especially at the end of 20th century, natural resources play an important role in conflicts in various parts of the world. This writing also describes various factors that influence conflicts and peace in relation to the existence of abundant of natural resources. It is inspired by theoretical framework formulated by Michael Beevers and previous research from the author.

**Key Words: Natural Resources, Resources Curse, Environmental Security, Conflict, Peace**

## **1. Pendahuluan**

Alam adalah sumber kehidupan. Ia melahirkan kehidupan, dan semua bentuk kehidupan pun kembali padanya. Namun, alam tidak hanya melahirkan kehidupan, tetapi juga merawatnya. Alam memberikan sumber daya yang amat berharga untuk hidup manusia, supaya ia bisa menopang keberadaannya.

Sumber daya alam adalah berkah bagi manusia. Dengan mengolah sumber daya alam yang ada, manusia bisa mengembangkan dirinya. Tidak hanya itu, juga dengan dukungan sumber daya alam, manusia bisa menciptakan kebudayaan dan peradaban. Di sini, sumber daya alam adalah beragam unsur di alam yang bisa dikelola untuk kepentingan manusia, mulai dari minyak, logam berharga sampai dengan hutan.

Di dalam perjalanan, kehadiran sumber daya alam justru kerap menjadi kutukan bagi manusia. Manusia menjadi rakus, sehingga konflik terjadi untuk memperebutkan sumber daya alam yang ada. Manusia juga menjadi malas, karena ia menggantungkan hidup dan kemakmurannya terhadap sumber daya alam yang ada. Bahkan, sejak dekade 1990-an, banyak konflik di berbagai belahan dunia menjadikan sumber daya alam sebagai latar belakang, sekaligus motif utama.

Di titik ini, perdamaian juga bisa menjadi kemungkinan, ketika sumber daya alam bisa dikelola dengan baik. Negara-negara yang bisa melakukan ini akan bisa menciptakan kemakmuran dan perdamaian yang lestari untuk warganya. Tulisan ini berupa untuk melihat tegangan antara sumber daya alam sebagai berkah perdamaian, atau sebagai kutukan konflik, secara mendalam. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian.

Bagian pertama tulisan ini menjelaskan tema utama dari tulisan ini. Bagian kedua merupakan analisis tentang konflik sumber daya alam dengan berbagai kemungkinannya. Bagian ketiga merupakan kesimpulan dari keseluruhan tulisan. Tulisan ini diinspirasi dari kerangka yang dikembangkan oleh Michael Beevers, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis.

## **2. Konflik Sumber Daya**

Perdamaian dunia sudah lama menjadi cita-cita manusia. Banyak pemikir merumuskan cara yang paling tepat untuk mencapai cita-cita tersebut. Banyak juga upaya sudah dilakukan. Salah satu upaya yang mungkin adalah memahami, apa yang menjadi akar konflik di banyak tempat. Setiap jaman, sayangnya, punya ciri yang berbeda.

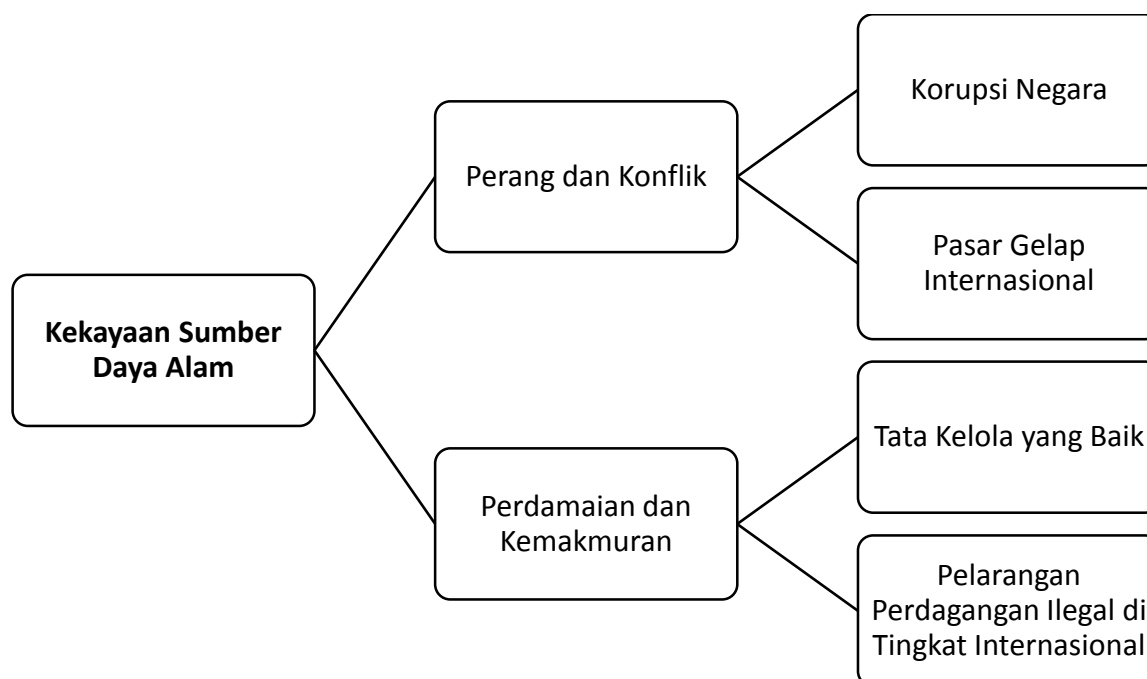
Sejak dekade 1990, penyebab utama konflik politik di berbagai tempat adalah soal sumber daya alam. Awalnya, para ahli berpendapat, bahwa sumber daya alam menjadi bahan konflik, karena semakin banyaknya jumlah manusia, sekaligus kerusakan lingkungan di berbagai tempat. Sumber daya alam menjadi langka, dan menjadi bahan rebutan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>1</sup> Para ahli di bidang politik internasional, terutama persoalan perdamaian dan keamanan, pun mulai melihat keberadaan sumber daya alam sebagai pemicu konflik utama.

Jumlah sumber daya alam yang melimpah di satu tempat, dibarengi dengan krisis lingkungan dan krisis sumber daya alam di tempat lain, mendorong terjadinya eksploitasi sekaligus perdagangan sumber daya alam ilegal. Dua motif dibalik hal ini adalah pelestarian diri di satu sisi, dan kerakusan di sisi lain. Negara-negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai bahan ekspor juga kerap kali lalu terjebak pada konflik politik dalam negeri yang berkepanjangan. Sejak akhir dekade 1990-an, berlian, minyak, kayu dan barang tambang mineral pun menjadi motif utama dari berbagai konflik politik di dunia, baik dalam negeri maupun internasional. Di dalam kajian ilmiah konflik dan perdamaian, kata-kata seperti „konflik sumber daya alam“ dan „kutukan sumber daya alam“ menjadi konsep-konsep penting.

---

<sup>1</sup> Kerangka mengacu pada (Beevers 2019)

**Bagan 1. Dampak Kekayaan Sumber Daya Alam<sup>2</sup>**



Sampai sekarang, hubungan antara perebutan sumber daya alam dengan konflik bersenjata masih terus menjadi bahan penelitian. Secara singkat, hubungan tersebut jelas nyata dan amat besar. Oleh karena itu, di tingkat internasional, beberapa usaha telah dilakukan, supaya sumber daya alam yang diperoleh secara ilegal, misalnya melalui konflik, tidak bisa diperdagangkan di tingkat global. Ini jelas tidak cukup. Sumber daya alam di suatu tempat harus diolah secara tepat, supaya menghasilkan perdamaian dan kemakmuran di daerah tersebut. Maka dari itu, komunitas internasional juga sepakat memastikan, supaya semua pengolahan sumber daya alam di berbagai negara dilakukan dengan peraturan yang adil, oleh institusi yang bersih, transparan, serta limbahnya pun diolah dengan baik (*good governance in natural resources management*).

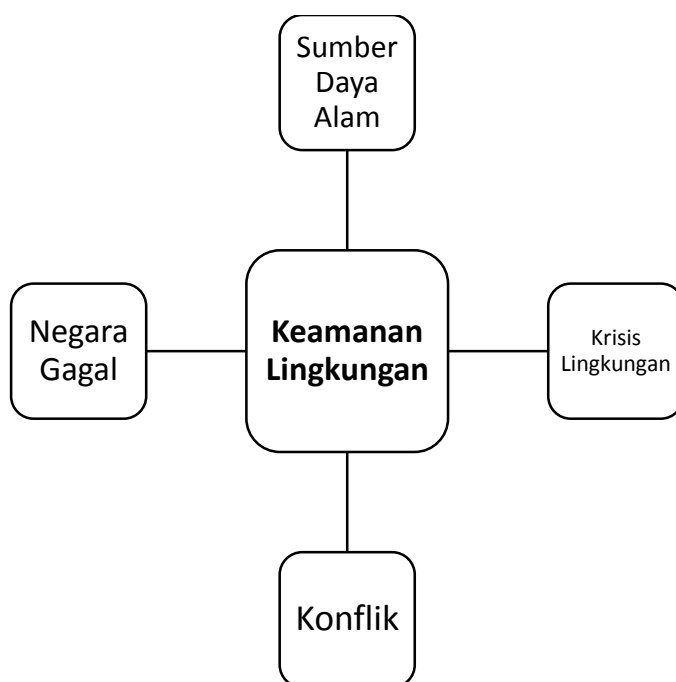
Di dalam kajian ilmu hubungan internasional, keprihatinan ini jatuh ke dalam wacana soal keamanan lingkungan (*environmental security*). Kajian utamanya adalah dampak dari sumber daya alam sekaligus kerusakan lingkungan terhadap tata hidup manusia secara global. Seringkali, keduanya bermuara pada konflik bersenjata berkepanjangan. Hubungan antara ketiga hal ini, yakni keberadaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan konflik

---

<sup>2</sup> Hasil rumusan penulis

bersenjata, menjadi kajian penelitian keamanan lingkungan, setelah perang dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet.

### Bagan 2. Kerangka Keamanan Lingkungan<sup>3</sup>



Di abad 20, ancaman keamanan terjadi, karena negara yang satu mengancam keberadaan negara lainnya. Namun, sejak awal abad 21, ancaman keamanan global terjadi, karena negara gagal, dan kemudian menghasilkan kelompok-kelompok teroris bersenjata.<sup>4</sup> Mereka mengancam tidak hanya keamanan dalam negeri, tetapi juga keamanan negara-negara lainnya. Kelompok-kelompok teroris, seperti ISIS, Taliban, Boko Haram dan Al-Qaeda, lahir dari negara gagal di Timur Tengah dan Afrika. Negara gagal (*failed state*) adalah negara yang tidak mampu mewujudkan keamanan, keadilan dan kemakmuran di wilayahnya.

Negara gagal merupakan salah satu masalah terbesar di dalam politik global abad 21. Negara-negara ini, sebagian besar ada di Afrika dan Timur Tengah, tak mampu

<sup>3</sup> Hasil rumusan penulis

<sup>4</sup> Lihat (Reza A.A Wattimena dan Bustanul Arifin 2018) dan (Wattimena 2018)

menghadirkan stabilitas di wilayahnya. Mereka terjebak dalam konflik berkepanjangan di dalam negeri. Beberapa negara gagal terjebak pula dalam terorisme, perdagangan senjata, penyebaran penyakit, krisis pengungsi dan lahirnya pemerintahan totaliter yang merusak kebaikan bersama. Masalah tak berhenti disitu.

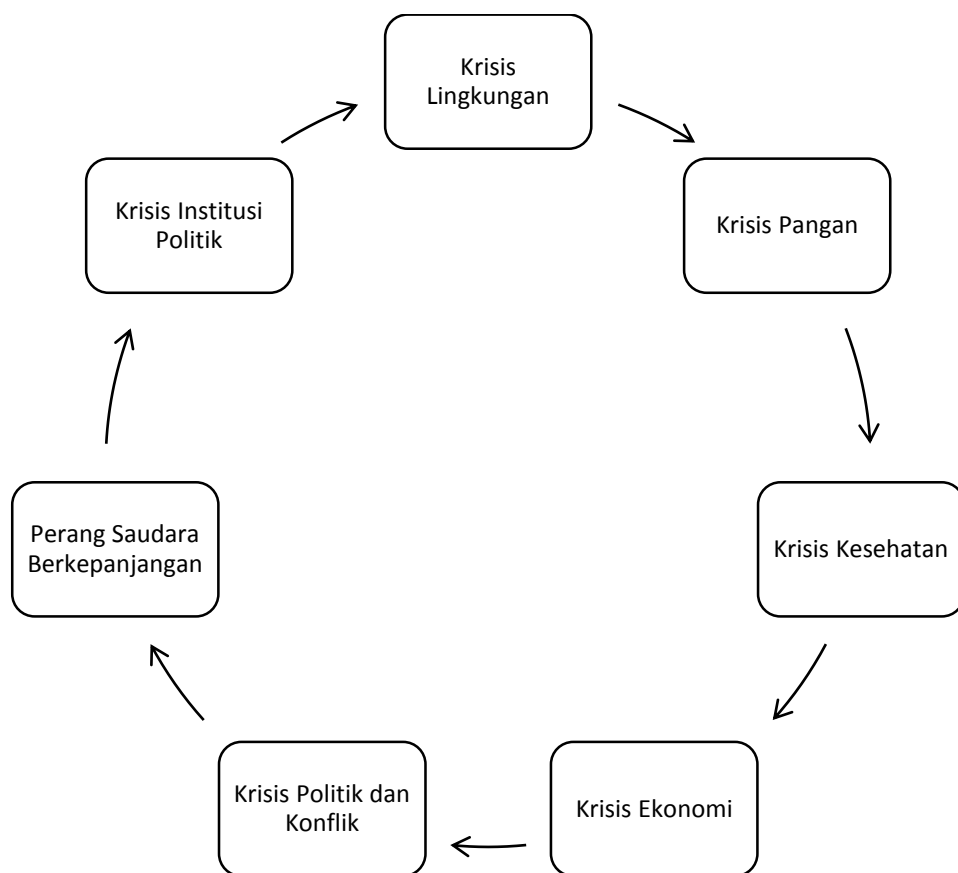
Negara gagal, terutama yang kaya akan sumber daya alam, mudah sekali jatuh ke dalam krisis lingkungan dan korupsi. Beberapa pihak akan menjadi sangat kaya, karena korupsi. Sementara, sebagian besar rakyat tetap hidup dalam konflik dan kemiskinan. Akan tetapi, ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah dan rakyat negara tersebut. Seringkali, negara gagal tercipta, karena campur tangan asing yang menghancurkan ekonomi maupun politik suatu negara.<sup>5</sup>

Seperti sudah disinggung sebelumnya, keberadaan sumber daya alam dan krisis lingkungan memang menjadi faktor penting di dalam konflik dua dekade di awal abad 21. Bencana nuklir di Russia dan kebakaran hutan di berbagai tempat, terutama di Indonesia dan Amerika Selatan, telah menjadi masalah internasional. Keamanan negara sekitarnya pun terancam. Keduanya dianggap sebagai sisi buruk pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Masalah kesehatan, mulai dari radiasi, penyakit paru-paru sampai berkembangnya jenis penyakit baru, pun menjadi hal yang perlu diperhitungkan.

---

<sup>5</sup> Lihat (Chomsky 2016)

**Bagan 3. Lingkaran Krisis di dalam Keamanan Lingkungan<sup>6</sup>**



Semua keadaan ini bisa mendorong terjadinya konflik di dalam negeri yang berdampak pula pada keamanan negara sekitarnya. Pola yang biasanya muncul adalah krisis lingkungan, misalnya krisis air, kebakaran hutan ataupun gagal panen, akan menciptakan krisis pangan, kemiskinan dan masalah kesehatan. Dalam jangka panjang, masalah pun semakin besar, dan mendorong rakyat untuk memberontak. Perang saudara pun sudah di depan mata. Ini lalu bisa membangkitkan dendam lama, misalnya antar ras, etnis ataupun agama, sehingga membuat konflik menjadi semakin lama, dan merusak.<sup>7</sup>

Keadaan ini membuat lingkungan menjadi fokus dari kajian keamanan yang baru. Di abad 21, dan seterusnya, ancaman utama dari keamanan global adalah keberadaan negara gagal, beserta segala masalahnya, dan krisis lingkungan. Dan seperti sudah disinggung

<sup>6</sup> Hasil rumusan penulis

<sup>7</sup> Lihat beberapa contoh kasus di Jerman, Afrika Selatan, Timor Leste dan Indonesia dalam (Wattimena, *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung* 2016) Belum ada penelitian soal unsur energi dan lingkungan di dalam wacana ini. Namun, buku ini melukiskan dampak berkepanjangan dari konflik bersenjata.

sebelumnya, krisis lingkungan akan melahirkan beragam krisis lainnya, mulai dari krisis kesehatan, kemiskinan, krisis energi, kriminalitas, krisis pengungsi dan perdagangan ilegal. Keberadaan negara gagal juga mengancam komunitas internasional. Ini melahirkan gerakan terorisme yang menggunakan tentara ilegal, serta perdagangan narkoba lintas batas negara dengan skala global.

Di abad 21, setelah berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, perdamaian dunia yang berpijak pada kebaikan bersama hanya dapat diwujudkan dengan mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara tepat. Ancamannya adalah kerusakan lingkungan, mulai dari krisis energi sampai dengan perubahan iklim yang membawa begitu banyak bencana. Karena ini semua berdampak secara global, maka kerja sama internasional untuk menangani masalah ini mutlak diperlukan. Inilah jantung hati dari konsep keamanan lingkungan. Karena ia berdampak luas pada beragam segi kehidupan manusia lainnya, maka ia juga disebut sebagai wacana keamanan manusia (*human security discourse*).<sup>8</sup>

Beberapa pemikir mencoba mempertanyakan keabsahan konsep keamanan lingkungan ini. Dengan menyatukan dua kata tersebut, yakni kata keamanan dan kata lingkungan, kesan militeristik akan secara alami muncul. Ini merupakan reaksi berlebihan atas keadaan yang sebenarnya. Hubungan antara konflik dan krisis lingkungan kemudian dipertanyakan. Apakah krisis lingkungan yang menyebabkan terjadinya konflik, atau sebaliknya, yakni konflik politik ekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan?

Konflik seringkali tertanam di dalam konteks ekonomi politik yang kacau di suatu masyarakat. Konteks ekonomi politik yang sama pula yang mengelola sumber daya alam maupun lingkungan hidup di masyarakat tersebut. Dengan kata lain, seluruh isu soal keamanan lingkungan dan sumber daya alam tertanam di dalam *konteks ekonomi politik* yang ada. Konteks inilah yang menentukan hubungan-hubungan kekuasaan yang berlangsung di dalam masyarakat tersebut.<sup>9</sup> „Kebutuhan akan energi di tingkat global atas sumber daya alam,“ demikian tulis Beevers, „adalah kekuatan yang jauh lebih besar yang mempengaruhi kerusakan lingkungan dan krisis energi, daripada kemiskinan dan kelebihan jumlah penduduk.“<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat (Beevers 2019)

<sup>9</sup> Tentang kekuasaan bisa dilihat di artikel berikut (Wattimena, Agama dan Kekuasaan: Tinjauan Transkeilmuan dan Kritik Ideologi July 2019)

<sup>10</sup> (Beevers 2019)



Ketika negara tunduk pada perusahaan-perusahaan besar yang hendak mengeruk sumber daya alam, maka berbagai krisis pun akan tercipta. Komunitas lokal akan dirugikan, baik dalam soal tanah, udara maupun air bersih. Dan seperti biasa, dalam hal ini, orang-orang yang miskin dan tak punya kekuatanlah yang akan dirugikan paling besar. Lepas dari perdebatan ini, analisis tentang konflik di abad 21 tak bisa dilepaskan dari krisis lingkungan, akibat dari pengerukan sumber daya alam. Berbagai negara dan organisasi internasional melihat, bahwa konflik ekonomi politik di abad 21 tidak akan pernah bisa dilepaskan dari konflik terkait lingkungan dan sumber daya alam.

Di abad-abad sebelumnya, krisis sumber daya alamlah yang melahirkan konflik. Namun, di abad 21 ini, konflik justru terjadi, karena melimpahnya sumber daya alam di suatu daerah. Hal ini terjadi terutama sejak dekade 1990-an, yakni dengan begitu banyaknya terjadi perang saudara di negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Di titik ini, konflik terkait sumber daya alam berada dalam kepungan konflik-konflik lainnya, terutama karena lemahnya negara, sehingga pemberontakan bersenjata bisa terjadi. Sumber daya alam yang ada kemudian dijual, baik oleh negara ataupun kelompok pemberontak, untuk menjadi sumber dana masing-masing, seringkali secara ilegal.

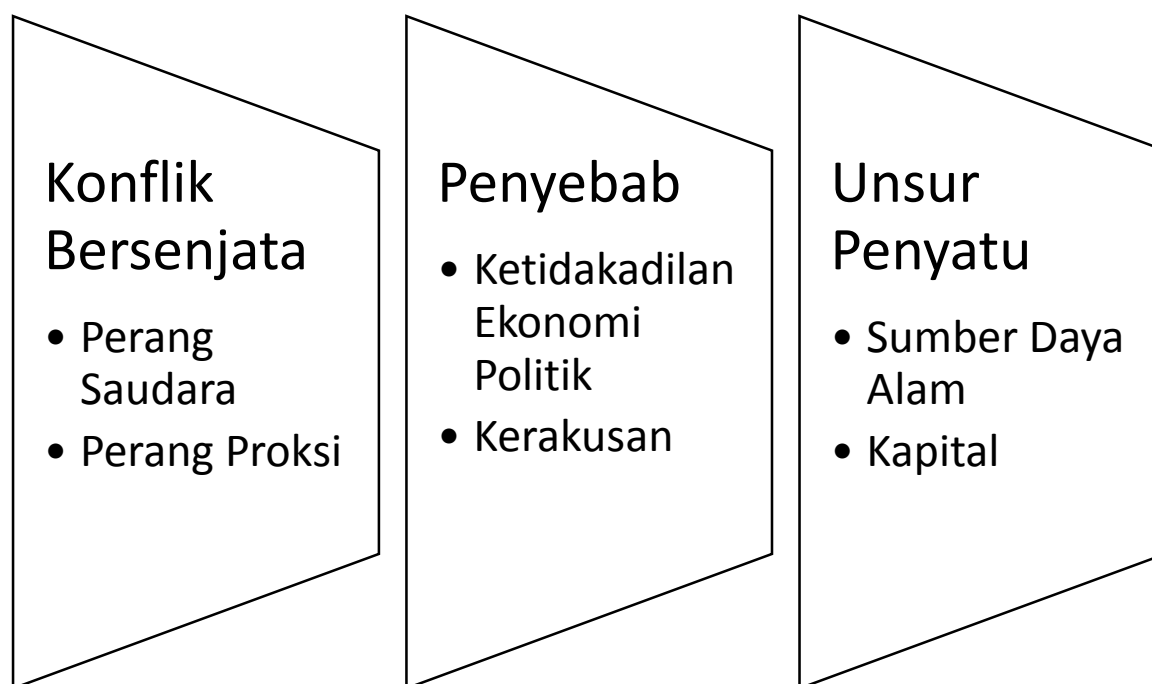
Di banyak tempat, perang saudara juga bisa terjadi, karena kemiskinan dan kesenjangan yang amat besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Kemiskinan mendorong orang menempuh jalan-jalan kekerasan untuk memperjuangkan nasib hidupnya. Perang pun lalu dilihat sebagai jalan cepat untuk mengubah tata ekonomi politik, sehingga kesejahteraan bisa terwujud. Jalan tercepat untuk menciptakan perang saudara adalah dengan mendirikan kelompok pemberontakan, atau bergabung dengan yang sudah ada. Perbedaan etnis, ras, dan agama lalu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tentang kesenjangan ekonomi global bisa dilihat di (A. A. Reza A.A Wattimena, *Narrowing the Global Gap: Eco-Social Market Economy as New Perspective to Deal with Global Economic Inequality and Economic Insecurity in 21st Century* 2017), (A. A. Reza A.A Wattimena, *Memahami Hubungan Internasional Kontemporer* 2019), (A. A. Reza A.A Wattimena, *To Infinity and Beyond: Cosmopolitanism in International Relations* 2018), dan (Lakner 2016)

<sup>12</sup> Bdk, (Wattimena, *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung* 2016)

**Bagan 4. Konflik Bersenjata<sup>13</sup>**



Di dalam sejarah, pemberontakan bersenjata terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah pertentangan ekonomi politik yang bermuara pada tuntutan untuk keadilan. Yang kedua adalah kerakusan, misalnya untuk memperkaya diri dengan berbagai sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam. Dalam dua hal ini, satu unsur yang terus muncul, yakni pentingnya sumber daya untuk melahirkan dan mempertahankan pemberontakan bersenjata. Sumber daya alam, dan kekayaan yang dilahirkan olehnya, menjadi daya dukung sekaligus motivasi bagi perang saudara.

Bagaimanapun, perang adalah sesuatu yang amat mahal. Ia bergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya alam yang bisa menghasilkan keuntungan. Dan memang, di abad 21 ini, kelompok pemberontak bersenjata mengandalkan eksploitasi sumber daya alam yang ada sebagai sumber dana mereka. „Konflik sipil bersenjata“, demikian tulis Beevers, „dalam konteks ini, dipandang sebagai praktik bisnis, atau aktivitas kriminal, yang didorong oleh kerakusan para bandit, dan bukan untuk mewujudkan keadilan

<sup>13</sup> Hasil rumusan penulis

sosial.<sup>14</sup> Pendek kata, keberadaan sumber daya alam menjadi unsur penentu di dalam konflik bersenjata dan perang saudara di abad 21.

Seluruh wacana tentang ini dikenal juga sebagai „konflik sumber daya“. Faktor kerakusan tentu bermain disini. Faktor ketidakadilan juga memiliki peran yang tak kalah penting. Dua faktor ini terhubung juga dengan kegagalan tata kelola pemerintah, atau yang disebut juga sebagai negara gagal. Ketika negara, dengan lembaga-lembaganya, tidak mampu menyediakan keadilan, keamanan dan kemakmuran untuk warganya, maka protes pun akan muncul. Protes yang tak terkelola akan bermuara menjadi konflik, dan bahkan perang saudara.

Inilah lingkaran setan negara gagal. Ketika pemerintah gagal menjalankan peran utamanya, maka akan tercipta pemberontakan dan konflik bersenjata. Semua ini justru memperparah keadaan, sehingga pemerintah semakin lemah. Negara pun semakin „gagal“. Namun juga penting diperhatikan, bahwa konflik yang terkait dengan sumber daya alam amatlah luas, tidak hanya perang saudara. Konflik antara pemilik tanah sebelumnya dengan perusahaan besar, terkait dengan pengerukan sumber daya alam, juga banyak terjadi.

Tragedi semacam ini banyak terjadi di benua Afrika. Kekayaan sumber daya alam memang seharusnya digunakan untuk memberikan kemakmuran bagi warga setempat. Namun, di benua Afrika, kekayaan sumber daya alam yang sama justru digunakan untuk menghancurkan kehidupan warga setempat. Minyak dan berlian, yang begitu banyak ditemukan di benua ini, dijual untuk membeli senjata, dan menggaji tentara bayaran. Konflik bersenjata menjadi semakin panjang, dan memakan korban jiwa maupun harta benda yang semakin besar.

Unsur kerakusan tentu memainkan peran disini. Kerakusan untuk memperoleh keuntungan besar dari penjualan sumber daya alam, mulai dari minyak, emas dan intan, melahirkan kekerasan dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Hal serupa terjadi di Asia, misalnya di Kamboja. Industri timah di Kamboja menjadi sumber dana bagi pemberontakan bersenjata, korupsi dan pengrusakan lingkungan. Hasilnya, kehidupan rakyat terjebak di dalam kemiskinan dan kelaparan.<sup>15</sup>

Hal ini menjadi perhatian utama komunitas internasional. Berbagai organisasi internasional sepakat untuk mengelola berbagai konflik yang terjadi terkait dengan

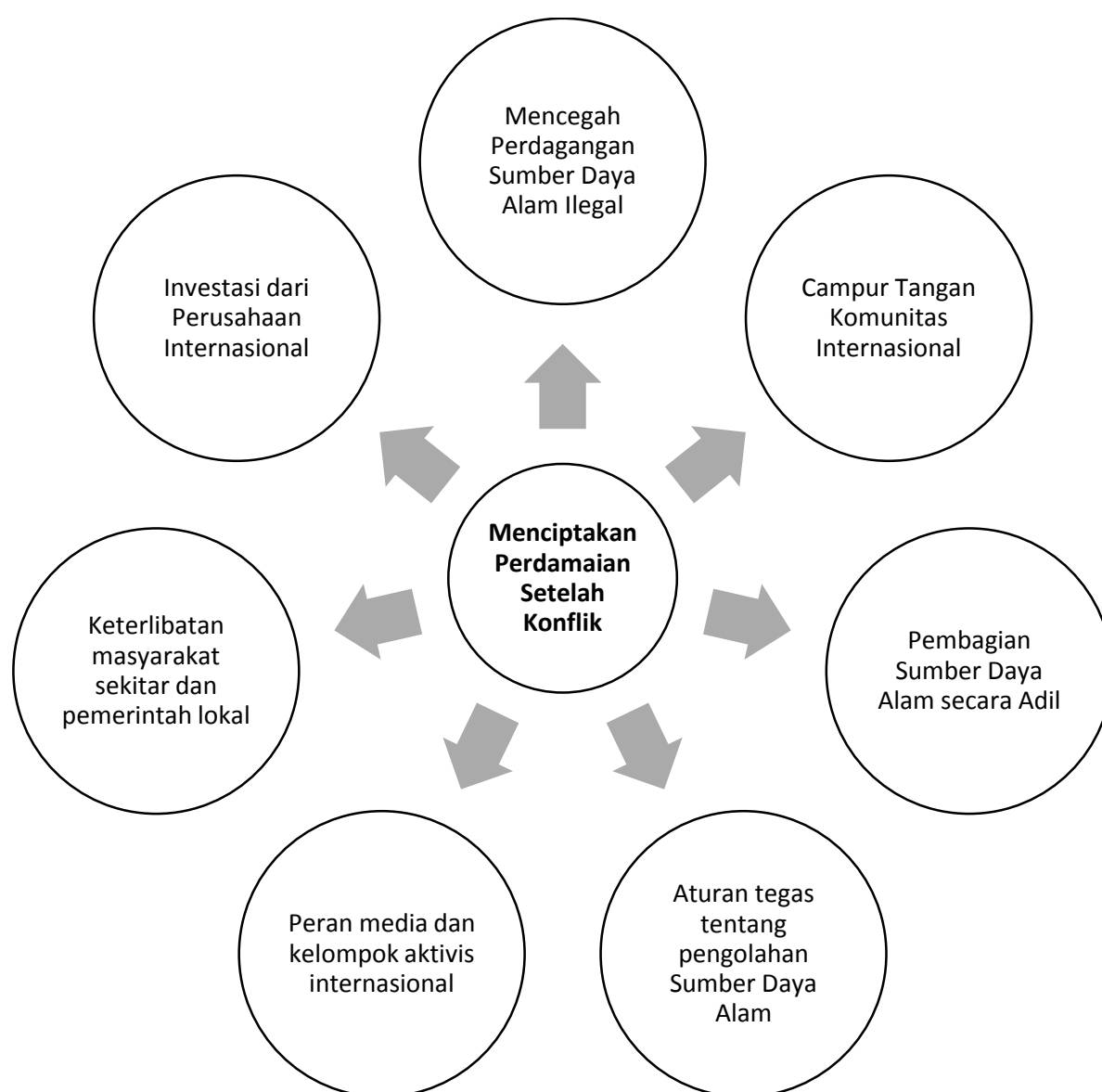
---

<sup>14</sup> (Beevers 2019)

<sup>15</sup> Lihat (Beevers 2019)

keberadaan sumber daya alam. Kesepakatan internasional juga telah dibuat untuk memberikan dukungan terhadap “negara-negara gagal”. Semua kesepakatan ini masuk dalam kerangka “menciptakan perdamaian” (*peacebuilding*). Tujuan dari kerangka internasional ini adalah menciptakan perdamaian di dalam semua level, ketika konflik terjadi. Namun, langkah-langkah pencegahan konflik jelas menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian bersama.

**Bagan 5. Langkah Menuju Perdamaian<sup>16</sup>**



<sup>16</sup> Hasil rumusan penulis

Langkah terpenting adalah mencegah penggalian sumber daya alam ilegal yang nantinya digunakan untuk mendukung konflik bersenjata. Pasukan perdamaian internasional harus dikirim di berbagai tempat penggalian sumber daya alam dan jalur distribusinya. Tentu saja, ada resiko konflik dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber daya alam tersebut. Ada juga bahaya pelanggaran hukum internasional, ketika komunitas internasional mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara. Maka dari itu, campur tangan lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya mungkin dengan persetujuan pemerintah resmi negara tersebut.

Beberapa contoh terjadi benua Afrika. Di Liberia, PBB diberi wewenang oleh pemerintah resmi untuk mendampingi pemerintah menciptakan administrasi politik yang bersih terkait dengan pengolahan sumber daya alam yang ada. Hal yang sama terjadi di Republik Demokratik Kongo. PBB diberi wewenang untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam oleh kelompok pemberontak bersenjata. Namun, ketika konflik bersenjata menjadi semakin besar, pasukan perdamaian PBB tidak dapat memberi dukungan yang maksimal.

Strategi perdamaian lainnya adalah dengan menciptakan perjanjian damai antara pihak-pihak yang berkonflik. Perjanjian ini didasarkan pada niat untuk membagi sumber daya alam yang ada, sehingga kedua belah pihak bisa merasakan manfaatnya. Di sini, sumber daya alam menjadi „alat perdamaian“, dan bukan menjadi bahan perebutan. Hal ini sudah diterapkan di Angola dan Sierra Leone dengan hasil yang cukup baik. Walaupun, dalam beberapa keadaan, jalan keluar semacam ini justru memperparah masalah. Seperti ketika pejabat korup dari pihak-pihak yang berkonflik justru menjadi penguasa sumber daya alam yang ada.

Cara semacam ini punya kelemahannya tersendiri. Konflik mungkin bisa berhenti. Namun, perdamaian yang sesungguhnya tidak akan tercipta, karena akar konflik tidak diungkap, dan diatasi. Pendekatan semacam ini bersifat sementara, sehingga peluang konflik tetap akan ada, dan kemungkinan akan terjadi dengan tingkat yang lebih besar di masa depan. Di dalam teori-teori perdamaian, perbedaan antara berhentinya gencetan senjata (*cease fire*) dan perdamaian lestari (*sustainable peace*) amatlah penting untuk diperhatikan.

Pendekatan lain adalah dengan menetapkan aturan yang resmi terhadap berbagai bentuk penggalian dan penggunaan sumber daya alam. Aturan ini dibuat, dan diterapkan

oleh komunitas internasional. Sejak 2003, PBB telah membuat aturan tegas terhadap delapan negara. Sumber daya alam yang diatur adalah minyak, timah dan intan, terutama di benua Afrika. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat kelompok pemberontak bersenjata kehilangan sumber daya untuk melanjutkan konflik, lalu bersedia untuk berunding untuk menciptakan perdamaian .

Tentu saja, pendekatan semacam ini mengundang banyak perdebatan. Salah satunya soal hak sebuah negara untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Akan tetapi, pertimbangan, bahwa sumber daya alam bisa membuat konflik bersenjata semakin lama dan berdarah, membuat pertimbangan soal hak negara tersebut menjadi tak relevan. Setelah PBB sepakat untuk melarang perdagangan sumber daya alam di suatu daerah tertentu, maka seluruh negara anggota wajib untuk mematuhi. Namun, seringkali, birokrasi semacam ini membutuhkan waktu lama, sehingga langkah-langkah untuk mengakhiri konflik seringkali juga terlambat.

Sampai sekarang, pendekatan ini masih terus menjadi bahan kajian. Beberapa data menunjukkan, bahwa pendekatan tidak membawa perubahan besar bagi upaya penciptaan perdamaian. Konflik bersenjata tetap terjadi. Karena mengalami kesulitan mendapatkan sumber daya alam untuk melanjutkan konflik, kelompok pemberontak bersenjata menjadi frustrasi. Ini diarahkan kepada masyarakat sipil, sehingga korban jiwa dan harta benda justru bertambah.

Sebaliknya, jika kelompok pemberontak bersenjata memperoleh sumber daya yang besar, maka mereka bisa memenangkan konflik yang terjadi. Dengan begitu, konflik pun bisa cepat berakhir. Stabilitas lalu bisa tercipta di dalam masyarakat. Di sisi lain, perpecahan di dalam kelompok pemberontak, akibat perebutan sumber daya, bisa juga memperlemah kelompok tersebut. Pemberontakan pun lalu bisa diakhiri dengan lebih cepat.

Tentu saja, konteks nyata tetap selalu harus diperhatikan. Aturan yang ketat, termasuk sanksi yang berat, terhadap eksploitasi sumber daya alam untuk perang tetap diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Biasanya, PBB membentuk tim khusus untuk melakukan kajian khusus. Tugas dari tim ini adalah untuk mengumpulkan informasi, melakukan analisa serta membuat rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan konflik bersenjata. Mereka juga membuat daftar internasional tentang negara-negara yang menggunakan sumber daya alam sebagai modal untuk

melakukan kekerasan dan ketidakadilan. Daftar ini bisa digunakan untuk melakukan boikot di tingkat politik maupun ekonomi global.

Peran kelompok aktivis internasional juga amat besar disini. Mereka melakukan penelitian tentang sumber daya alam yang digunakan untuk menciptakan konflik di berbagai negara. Lalu, mereka memberikan rekomendasi kepada PBB. Salah satu peran besar mereka adalah terkait dengan persoalan berlian berdarah di Angola dan Sierra Leone. Tanpa peran kelompok aktivis internasional ini, PBB, dan berbagai lembaga internasional lainnya, tak akan mampu mengurangi dan mengakhiri konflik yang terjadi, akibat perebutan dan eksploitasi sumber daya alam.

Peran media internasional juga amat besar dalam hal ini. Mereka menyediakan informasi-informasi penting tentang apa yang terjadi di lapangan. Media lokal biasanya sudah dikuasai oleh pemerintah, sehingga pemberitaan mereka menjadi tidak obyektif. Jurnalis dari berbagai media internasional juga bisa memasuki tempat-tempat yang tak bisa dicapai oleh organisasi internasional. Beberapa kelompok pemberontak masih menghormati status jurnalis. Sejak dekade 1990-an, media internasional banyak mengungkap, bahwa unsur ekonomi, terutama penguasaan sumber daya alam, lebih kuat mewarnai konflik bersenjata di berbagai tempat, daripada unsur politik.

Perjanjian perdamaian memang penting, ketika konflik bersenjata terjadi. Namun, proses setelah itu juga cukup rumit. Keamanan harus dipertahankan. Makanan, keperluan medis dan air juga perlu dipenuhi. Kelompok pemberontak harus kembali hidup bersama di dalam masyarakat. Para korban pun harus kembali ke rumah mereka masing-masing yang mungkin sudah hancur, akibat konflik bersenjata sebelumnya.

Secara keseluruhan, warga membutuhkan infrastruktur untuk bekerja, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti kesehatan, pendidikan dan sanitasi yang bermutu. Gedung-gedung pemerintahan, jalan raya dan rumah sakit juga harus segera dibangun. Pemerintahan yang sah juga perlu untuk dibentuk, yang dipilih secara demokratis oleh rakyat setempat. Investasi pun perlu dilakukan untuk menggerakkan roda ekonomi yang hancur, akibat konflik bersenjata.<sup>17</sup>

Proses membangun dan merawat perdamaian setelah konflik bersenjata memang sebuah proses yang kompleks. Namun, inti terpenting dari proses ini tetaplah sama, yakni

---

<sup>17</sup> Bdk, (Wattimena, *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung* 2016)

mengungkap akar masalah yang mengakibatkan konflik terjadi. Tujuannya adalah supaya konflik dengan pola yang sama, dan sebab yang sama, tak lagi terulang. Proses membangun perdamaian harus mengarah pada perdamaian yang lestari. Artinya, budaya perdamaian harus tercipta, supaya ia tetap ada dalam jangka panjang.<sup>18</sup>

Perdamaian yang lestari hanya dapat dicapai, jika sumber daya alam yang ada bisa dikelola dengan tepat. Negara, dan berbagai lembaga lokal lainnya, kerap kali tak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di titik ini, peran serta berbagai lembaga internasional amatlah penting. Jika tidak dilakukan, kelompok pemberontak bisa kembali memperoleh sumber daya alam untuk modal pemberontakan bersenjata selanjutnya. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mencegah terulangnya konflik adalah dengan campur tangan komunitas internasional melalui sanksi penggunaan maupun perdagangan sumber daya alam, sekaligus dukungan ahli untuk pemerintah lokal yang sah.

Jalan lainnya adalah dengan mengontrol secara langsung pengelolaan sumber daya alam yang digunakan sebagai pendukung konflik. Di titik ini, peran pemerintah dan masyarakat lokal diabaikan. Komunitas internasional langsung mengontrol sumber daya alam yang ada. Tentu saja, keberadaan militer internasional amat diperlukan disini. Pengerahan tentara internasional juga merupakan salah satu tantangan di dalam proses ini.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



**Bagan 6. Tantangan Menciptakan Perdamaian<sup>19</sup>**



Tantangan lainnya terkait dengan letak dari sumber daya alam yang ada. Kerap kali, sumber daya alam yang ada tersebar di daerah-daerah terpencil. Pasukan perdamaian internasional sulit untuk mencapai, sekaligus mengelola daerah tersebut. Pemerintah lokal juga seringkali melakukan korupsi dalam hal ini, sehingga sumber daya alam yang ada tidak bisa dikelola dengan baik. Jika hal ini terjadi, maka perebutan sumber daya alam sebagai pendukung konflik bisa kembali terjadi. Masyarakat pun terjatuh kembali ke dalam konflik.

---

<sup>19</sup> Hasil rumusan penulis

Jauh sebelum konflik terjadi, di banyak tempat, masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam yang ada. Pengolahan sumber daya alam menjadi mata pencaharian utama untuk melangsungkan hidup mereka. Kehadiran pasukan perdamaian internasional pasti membawa dampak pada hal ini. Masyarakat setempat jelas harus diajak terlibat di dalam pengolahan sumber daya alam yang ada. Perdamaian dan kemakmuran yang lestari amat tergantung dari mutu kerja sama ini.

Teknologi bisa juga membantu dalam proses ini. Lembaga mandiri terkait sertifikasi sumber daya alam bisa didirikan, dan memperoleh dukungan internasional. Tugas lembaga ini adalah memastikan, bahwa sumber daya alam yang ada sudah diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu lembaga yang paling maju dalam hal ini adalah *Kimberley Process Certification Schemes* (KPCS) yang diciptakan pada tahun 2000, dan mulai aktif bekerja pada 2003.<sup>20</sup> Tugas mereka adalah memberikan sertifikasi terhadap intan yang diperdagangkan secara global, bahwa intan tersebut diolah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Program semacam ini adalah hasil kerja sama internasional antara berbagai negara, organisasi internasional dan industri. Mereka juga menyediakan data terkait dengan sumber daya alam yang terkait dengan konflik bersenjata yang terjadi. Lepas dari keberhasilan lembaga semacam ini, beberapa tantangan tetap ada. Usaha untuk memalsukan dokumen terus saja terjadi, walaupun sudah ada upaya untuk menanggulangnya. Namun, secara keseluruhan, metode semacam ini dianggap cukup efektif untuk mencegah digunakannya sumber daya alam ilegal sebagai modal untuk melakukan konflik bersenjata.

Komunitas internasional juga bisa menekan pemerintah dan perusahaan untuk membatalkan kontrak perjanjian mereka terkait sumber daya alam yang diperoleh di daerah konflik. Selama perang berlangsung, banyak pemerintah dan perusahaan membuat perjanjian dagang dengan para pelaku konflik. Ini kerap kali merugikan masyarakat secara luas, dan membuat konflik berlangsung semakin lama. Karena eksploitasi dan perdagangan ilegal, pihak-pihak yang berkonflik seringkali melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal, dan merusak lingkungan. Dengan memaksakan pembatalan kontrak dagang terkait dengan sumber daya alam ilegal, komunitas internasional, seperti ditulis oleh Beevers, „bisa memutus hubungan antara sumber daya alam, pemasukan dan konflik.“<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat (Beevers 2019)

<sup>21</sup> *Ibid*

Sumber daya alam tidak hanya memicu lahirnya konflik, tetapi juga penting untuk menciptakan perdamaian. Konflik bersenjata selalu merusak tata ekonomi maupun politik yang ada. Infrastruktur bisa hancur, dan masyarakat bisa terjebak ke dalam kemiskinan. Sumber daya alam, jika dikelola secara tepat, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan. Pemerintah juga bisa memperoleh uang untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat luas.

Memang, ada banyak cara untuk memicu pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Yang paling banyak digunakan adalah dengan mengembangkan pertanian, sekaligus industri untuk kepentingan konsumsi dan ekspor. Namun, dibandingkan dengan kedua cara itu, pengolahan sumber daya alam yang efisien dan adil bisa lebih cepat memicu pertumbuhan ekonomi yang ada. Unsur ini amat penting untuk menghindari „jebakan konflik“, atau lingkaran setan konflik. Kemiskinan memicu konflik bersenjata, dan akhirnya memperbesar kemiskinan yang ada.

Di dalam pendekatan studi perdamaian, cara pandang yang umum digunakan adalah pendekatan pasar-ekonomis di dalam mengakhiri konflik. Jika keadaan ekonomi masyarakat meningkat, bersama dengan meningkatnya daya beli dan ketersediaan barang dan jasa, maka orang akan enggan untuk berkonflik satu sama lain. Maka dari itu, pendekatan studi perdamaian tidak akan pernah bisa mengabaikan ketersediaan sumber daya ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara umum. Untuk jangka pendek, komunitas internasional bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan. Namun, pada akhirnya, sebuah negara harus bisa secara mandiri mengembangkan ekonomi, dan menyejahterahkan warganya.

Maka dari itu, persis setelah konflik berakhir, pemerintah lokal dan komunitas internasional harus segera menemukan tempat-tempat yang kaya akan sumber daya alam. Mereka harus menciptakan aturan untuk pengolahan sumber daya alam tersebut seadil mungkin. Ini penting untuk menciptakan kemakmuran, sekaligus melestarikan perdamaian yang baru saja tercipta. Perusahaan-perusahaan besar internasional juga punya peran besar disini sebagai investor. Semua ini haruslah tetap berpijak pada satu fokus, bahwa sumber daya alam yang ada dikelola untuk perdamaian dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat.

Di banyak negara, setelah konflik berakhir, sumber daya alam menjadi salah satu industri pertama yang menarik perhatian dunia internasional. Namun, ada beberapa tantangan yang muncul disini. Tata politik yang lemah membuat pemerintah menjadi cenderung tak stabil. Infrastruktur yang bermutu rendah juga menjadi tantangan untuk melakukan transaksi bisnis. Ini semua ditambah dengan aparat negara yang cenderung melakukan korupsi untuk memperkaya diri, dan merugikan masyarakat luas.

Di dalam masyarakat yang baru saja selesai dari konflik, peraturan hukum juga masih lemah. Peraturan terkait pajak dan fasilitas masih mengambang, dan terus berubah. Walaupun ada, peraturan tersebut kerap kali tak adil, memiliki banyak celah korupsi dan cenderung menguntungkan segelintir pihak semata. Unsur keamanan juga masih menjadi tantangan besar. Kelompok pemberontak kerap kali masih menyisakan orang-orang yang menjadi ancaman keamanan bagi masyarakat sekitar.

Secara umum, kehadiran sumber daya alam justru bisa menjadi petaka bagi masyarakat sekitar. Di dalam wacana teori-teori politik, keadaan ini disebut juga sebagai „kutukan sumber daya“. Berbagai penelitian menunjukkan, bahwa negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam akan mengalami kegagalan tata politik maupun ekonomi. Ketergantungan ini, yang menciptakan kegagalan tata politik dan ekonomi di masyarakat, juga memperbesar kemungkinan terjadinya konflik maupun perang saudara. Bahkan, secara umum dapat dikatakan, bahwa negara-negara dengan sumber daya alam yang besar justru lebih lambat pertumbuhan ekonominya, jika dibandingkan dengan negara-negara yang tak memilikinya.

### **3. Kesimpulan**

Setelah konflik berlalu, perdamaian yang lestari adalah sesuatu yang dirindukan. Banyak unsur yang mempengaruhi proses ini. Apakah perdamaian yang sudah diraih bisa berlanjut, atau tidak? Tidak ada satu unsur yang menciptakan konflik, dan juga tidak ada satu unsur pun yang menciptakan perdamaian. Namun, keberadaan sumber daya alam, dan bagaimana ia dikelola, memainkan peranan besar dalam hal ini. Pandangan ini telah menjadi bagian dari pandangan umum komunitas internasional. Dunia akademik juga sudah menyadari ini. Banyak penelitian dilakukan untuk melihat hubungan antara sumber daya alam, konflik dan perdamaian di berbagai tempat. Ini jelas merupakan perkembangan yang amat penting di dalam ilmu pengetahuan, terutama kajian perdamaian.

**Daftar Acuan**

- Beevers, Michael D. 2019. *Peacebuilding and Natural Resource Governance After Armed Conflict*. Palgrave.
- Chomsky, Noam. 2016. *Who Rules the World*. Metropolitan Books.
- Lakner, Christoph. 2016. "Global Economic Inequality The Implications of Thomas Piketty's Capital in the 21st Century." *Policy Research Working Paper 7776*, World Bank Group.
- Reza A.A Wattimena, Anak Agung Banyu Perwita. 2019. *Memahami Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Reza A.A Wattimena, Anak Agung Banyu Perwita. 2017. "Narrowing the Global Gap: Eco-Social Market Economy as New Perspective to Deal with Global Economic Inequality and Economic Insecurity in 21st Century." *Andalas Journal of International Studies Vol 6 No 1*.
- . 2018. *To Infinity and Beyond: Cosmopolitanism in International Relations*. Jakarta: Ary Suta Center.
- Reza A.A Wattimena, Bustanul Arifin. 2018. "Melampaui Terorisme: Pendekatan Komprehensif untuk Memahami dan Menangkal Terorisme." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta* 1 (1).
- Wattimena, Reza A.A. July 2019. "Agama dan Kekuasaan: Tinjauan Transkeilmuan dan Kritik Ideologi." *Ary Suta Center Series on Strategic Management*.
- Wattimena, Reza A.A. 2018. "Kosmopolitanisme Sebagai Jalan Keluar Atas Tegangan Abadi Antara Neo-Kolonialisme, Radikalisme Agama dan Multikulturalisme." *Jurnal Ledalero*.
- . 2016. *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung*. München.